

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub-sub sistem, dan sub-sub sistem tersebut dapat pula terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang lebih kecil (Ranatarisza dan Noor, 2013:3). Definisi mengenai sistem diatas dapat disimpulkan, bahwa yang disebut dengan sistem adalah elemen elemen yang saling berkaitan satu sama lain, bekerja bersama menjadi suatu kesatuan yang terpadu untuk mencapai satu tujuan akhir. Suatu sistem ini nantinya merupakan bagian dari sistem yang lainnya dan terdiri dari sub-sub sistem yang lebih kecil.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian prosedur adalah transaksi perusahaan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dibuat secara beruntun, dan dilakukan secara berulang-ulang (Baridwan, 2009:3).

Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur menurut beberapa sumber, perbedaan mendasar antara lain pengertian sistem dan prosedur yaitu : “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sebagaimana hingga menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang” (Ranatarisza dan Noor, 2013:4).

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Berbagai macam pengertian mengenai sistem akuntansi, berikut ini disajikan beberapa definisi yang berbeda dari beberapa sumber :

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedmikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2010:3).” Definisi sistem akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan pengorganisir sumber daya perusahaan tersebut berupa aturan, kebijakan, standar, prosedur, dan lain-lain dalam upaya menyediakan informasi akuntansi dan keuangan bagi manajemen perusahaan.

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Zaki Badriwan,2004:4).

Sistem akuntansi pada umumnya diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi, maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang yang berkepentingan (Narko,2007:3)

Pengertian yang dijabarkan dapat ditarik kesimpulan sistem akuntansi adalah sekumpulan sumber daya (manusia, formulir, catatan prosedur, dan laporan) yang dikordinasi untuk mengubah data atau mengolah data dari kegiatan perusahaan menjadi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan dan selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada manajemen guna pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan serta untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil kegiatan perusahaan.

2.1.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan (Diana 2011:4). Memproses transaksi yang dimaksud bisa berupa mencatat aktivitas pengeluaran kas ke dalam jurnal.

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menginformasi data akuntansi menjadi informasi (Bodnar, 2010:8)

Berdasarkan pengertian dari ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem informasi akuntansi juga dapat disimpulkan sebagai sub-sub sistem yang paling saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari data transaksi untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengambilan dan pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak lain di luar perusahaan.

2.1.1.3 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas akuntansi didalam melaksanakan aktivitasnya. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Wikinson (2000:10) yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana terdiri dari :

1. Sumber daya manusia dan alat
2. Data (catatan)
 - Formulir
 - Jurnal
 - Buku besar
 - Buku besar pembantu
- 3, Informasi dan laporan

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia dan alat

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat berfungsi. Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam pengambilan keputusan apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Manusia juga mengendalikan jalannya sistem. Alat merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atas perhitungan dan meningkatkan kerapian bentuk informasi.

2. Data (catatan)

Data dihasilkan dari catatan-catatan berupa jurnal-jurnal, buku besar, buku besar pembantu, dan formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti tertulis dari pemberian kredit dan lain-lain. Data yang terkumpul, biasanya menjalani serangkaian tahap pemrosesan untuk dapat diubah menjadi informasi yang berguna.

3. Informasi dan laporan

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi akuntansi keuangan dan sistem manajemen. Informasi tersebut antara lain : Neraca, Laporan laba rugi, Laporan laba ditahan, Daftar umur piutang , Daftar hutang yang akan dibayar.

2.1.1.4 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk kebutuhan pihak internal maupun eksternal, sistem informasi akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat dihasilkan informasi yang berguna dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

Tujuan utama diadakannya sistem informasi akuntansi menurut Wikinson (2000:8) ada dua, tujuan utama dan tujuan spesifik.

Tujuan utama yaitu :

“To provide accounting information to a wide variety of users”

Sedangkan tujuan spesifik sistem informasi akuntansi adalah :

1. *To support the day to day operations.*
2. *To support decision making by internal decision makers.*
3. *To fulfill obligations relating to stewardship.*

Tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan-tujuan utama dan tujuan akhir sistem akuntansi, yaitu cepat, efisien, aman dan dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian.

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2001:37) bagi organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi.
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal.
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha.

Secara singkat tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi

Yaitu informasi yang tepat guna (relevan), lengkap, dan terpercaya (akurat), dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian intern (internal check).

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha

Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan harus lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi.

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait. Peningkatan kualitas maupun kuantitas informasi dan pengendalian internal yang diperlukan tidak dapat dilaksanakan apabila mengakibatkan peningkatan biaya. Sehingga dalam penyusunan suatu sistem akuntansi untuk meningkatkan kualitas informasi dan pengendalian internal harus selalu memperhatikan keseimbangan antara manfaat dan biaya.

Fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2001:30) adalah :

“Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, dapat dipercaya, (akurat) dan lengkap yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi akuntansi yang tepat waktu.
- b. Untuk memberikan informasi akuntansi yang relevan.
- c. Untuk memberikan informasi akuntansi yang dapat dipercaya.

2.1.2 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menjalankan kegiatannya sangat membutuhkan pengendalian intern. Hal ini diperlukan untuk mengawasi jalannya perusahaan. Penerapan suatu pengendalian intern yang baik adalah dengan menerapkan suatu sistem yang disebut dengan sistem pengendalian intern “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dapat dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Hariningsih, 2006:129).” Kesimpulan dari sistem pengendalian intern merupakan suatu metode atau cara agar dapat menerapkan suatu pengendalian intern yang baik yang kemudian untuk menjaga dan meliputi sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2.1.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung Jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatur secara tegas dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut Untung (2009:1), pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pelaksanaan CSR diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, dan bagi perusahaan proses operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Jika hubungan perusahaan dan masyarakat baik maka dipastikan kegiatan operasional perusahaan tidak akan bermasalah. Menurut Untung (2009:6), terdapat beberapa manfaat akan pelaksanaan program CSR bagi perusahaan, diantaranya :

1. Memperhatikan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders .
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.

10. Peluang mendapatkan penghargaan.

2.1.4 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bagian CSR dari perusahaan BUMN. Program kemitraan, perusahaan menerapkannya pada sektor-sektor perekonomian yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor perikanan. Sedangkan untuk sektor Bina Lingkungan dilakukan melalui program korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Implementasi Undang-Undang ini adalah dengan terbentuknya program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh seluruh perusahaan BUMN. Dari pandangan bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2.1.5 Program Kemitraan

Program kemitraan merupakan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh perusahaan BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba yang diperoleh BUMN. Jumlah dana yang disisihkan oleh BUMN untuk terlaksanakannya Program Kemitraan adalah maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih. Jangka waktu yang dimiliki oleh mitra binaan untuk menikmati pinjaman Program Kemitraan ini adalah selama 24 bulan atau selama 2 tahun. Tipe pinjaman tersebut merupakan dana bergilir yang digunakan oleh mitra binaan dan calon mitra binaan pada periode setelahnya. Dengan bunga flat yaitu 6% (enam persen) yang relatif lebih rendah dengan pinjaman bank.

Berikut merupakan tujuan dari Program Kemitraan yang dilakukan oleh BUMN adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.

- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku program kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, Wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

UMKM memiliki beberapa peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan sektor usaha yang lainnya. Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai sekitar 96%.

Selain dapat mengurangi tingkat pengangguran, UMKM juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam pembentukan PDB (*Product Domestic Bruto*). Dengan naiknya nilai PDB, akan mampu menggerakkan dan memacu percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

UMKM juga meningkatkan tingkat ekspor Indonesia. Produk-produk yang lebih banyak di ekspor adalah produk lokal yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Hal ini juga dapat sebagai kampanye, sehingga dunia luar akan semakin mengenal produk-produk dan budaya Indonesia.

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, UMKM harus selalu berusaha mengembangkan bisnisnya. Beberapa masalah yang dihadapi UMKM dalam hal pengembangan usahanya, yaitu masalah pendanaan, promosi, sumber daya manusia, dan bahan baku.

2.1.7 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari Bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sedangkan *creditum* berasal dari Bahasa Latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Ini mengimplikasikan bahwa setiap kegiatan perkreditan dilandasi dengan kepercayaan. Tanpa adanya landasan kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit ataupun sebaliknya tidak akan ada calon debitur menyepakati kredit.

Bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang (Drs. Amir Rajab Batubara dalam Firdaus dan Ariyanti, 2008:2). Definisi kredit yakni kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam baik berupa uang, barang ataupun jasa antara dua pihak, dimana pihak pertama disebut dengan kreditur dan pihak kedua sebagai debitur yang bersedia untuk mengembalikan dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

2.1.7.1 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:103) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Resiko
5. Balas Jasa

Unsur-unsur pemberian kredit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pemberi kredit, resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja misalnya karena bencana alam atau bankrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balasnya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.7.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan pemberi kredit sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi tersebut didirikan

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2003:105) sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

Tujuan pemberian kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar .

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi. Fungsi kredit tersebut menurut Kasmir (2003:107) adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.
7. Untuk meningkatkan pemeretaan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Fungsi- fungsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh kreditur akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk peredaran barang biasanya untuk perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyaknya kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula terciptanya perdamaian dunia.

2.1.7.3 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2003:112) antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif
 - b. Kredit Konsumtif
 - c. Kredit Perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit Jangka Pendek
 - b. Kredit Jangka Menengah
 - c. Kredit Jangka Panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian

- b. Kredit peternakan
- c. Kredit industry
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit pendidikan
- f. Kredit profesi
- g. Kredit perumahan

Secara singkat jenis-jenis kredit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.1.7.4 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan sesuai sasaran dan terjamin pemberian kredit tersebut tepat waktu sesuai perjanjian.

Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokok, maka sudah sewajarnya apabila pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti sesuai prinsip-prinsip pemberian kredit.

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Nasional dapat digolongkan menurut formula 5C, 7P dan 3R, adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C menurut S. Munawir (2004:235-236) adalah sebagai berikut :

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*

5. *Condition of economy*

Prinsip-prinsip 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak pemberi pinjaman bahwa peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. *Capacity*

Yang dimaksud *capacity* disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa *capacity* dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang diperoleh calon debitur dalam mengelola perusahaannya untuk melunasi hutang-hutangnya pada waktunya.

3. *Capital*

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatan kondraktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun demikian halnya dalam kaitan bisnis yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang debitur yang telah menanamkan dananya dalam proposisi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan. Kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena guncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

4. *Collateral*

Yang dimaksud dengan *collateral* ini yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana

debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat dipakai sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang saat kredit tersebut dilunasi.

5. *Condition of Economy*

Yang dimaksud *condition of economy* yaitu situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan untuk memperoleh kredit. *Condition of economy* sangat penting untuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri.

2.1.7.5 *Kebijakan Kredit*

Pengelola kredit yang sehat adalah kebijakan kredit yang sehat, dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemberi kredit. Kebijakan kredit yang baik adalah kebijakan cukup luwes untuk keadaan yang berubah-ubah dan memberikan peluang untuk keputusan-keputusan individual. Kebijakan yang direncanakan dengan matang dan praktik pemberian kredit yang hati-hati adalah esensial bagi efektifnya fungsi penciptaan kredit dan untuk meminimumkan resiko yang terdapat pada setiap pemberian kredit. Kebijakan kredit harus secara tertulis karena hanya dengan demikianlah kebijakan itu dapat dipahami secara jelas dan seragam oleh pejabat yang memberikan atau mengesahkan kredit tersebut.

Untuk meminimumkan resiko terjadinya kredit macet, maka pemberi kredit perlu melaksanakan kebijakan kredit seperti yang dijabarkan diatas. Untuk masa ini kredit tidak bisa sembarang diberikan kepada debiturnya, hanya usaha yang jelas prospeknya saja yang dapat diberikan kredit.

2.1.8 **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur merupakan transaksi yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dibuat secara berurutan dan dilakukan secara berulang-ulang. Prosedur pemberian kredit dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Apabila ditinjau dari segi tujuannya yakni untuk keperluan konsumtif ataukah keperluan produktif.

Penjelasan mengenai prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas, pemohon kredit dalam hal ini mengajukan permohonan kredit berupa proposal dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman, untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan dan benar. Apabila menurut pihak kreditur dirasa berkas pinjaman belum benar dan lengkap maka pemohon diminta untuk segera melengkapi sampai jangka waktu tertentu dan jika pemohon tidak sanggup melengkapi berkas-berkas tersebut maka permohonan kredit dianggap batal oleh kreditur.
3. Wawancara I, yaitu penyelidikan kepada calon debitur secara langsung, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut telah sesuai dan lengkap.
4. *On the Spot*, yakni kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha maupun sebagai jaminan, yang kemudian dicocokkan dengan wawancara I.
5. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, apabila terdapat kemungkinan adanya kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.
6. Keputusan kredit, dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan ataukah ditolak.
7. Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan yang selanjutnya membuka rekening tabungan untuk calon debitur.
8. Penyaluran / pencairan dana, merupakan pengambilan atau pencairan uang dari rekening yang telah dibuat sebelumnya sebagai realisasi dari pemberian kredit. Dapat diambil secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya (Kasmir, 2008:114).

2.1.9 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak penyelenggaraan analisis (Abdullah,2005:95). Pelaksanaan pengawasan kredit bukanlah mencari kesalahan atau penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit, melainkan upaya untuk menjaga agar

apa yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Proses pengawasan kredit telah dimulai semenjak penilaian jaminan.

Pengawasan kredit terhadap debitur dilakukan melalui hasil analisa kreditnya. Seluruh aspek dalam analisa kredit dilakukan secara terus menerus selama kredit berjalan, terutama pada target produktivitas yang harus dicapai debitur. Hal ini dapat dipantau dari keseimbangan antara perputaran keuangan dalam rekening pinjamannya (penyetoran-penyetoran dan pengambilan-pengambilan) telah sesuai dengan kegiatan usaha debitur.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pemberian Pinjaman Usaha :

R. Hang Galan M. D (2015) dengan judul *Prosedur Pemberian Pinjaman Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Pada Bagian Community Development Center (CDC) di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk*".

Hita Sekar Tanjung Kirana, Dwiatmanto, Achmad Husaini (2016) dengan judul "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Untuk Mencegah terjadinya kredit bermasalah".

Intan Nuraini (2015) dengan judul "Analisi Pemberian Kredit Pada Program Kemitraan PT. Telkom, Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Binaan PT. Telkom Malang Regional V Jawa Timur".

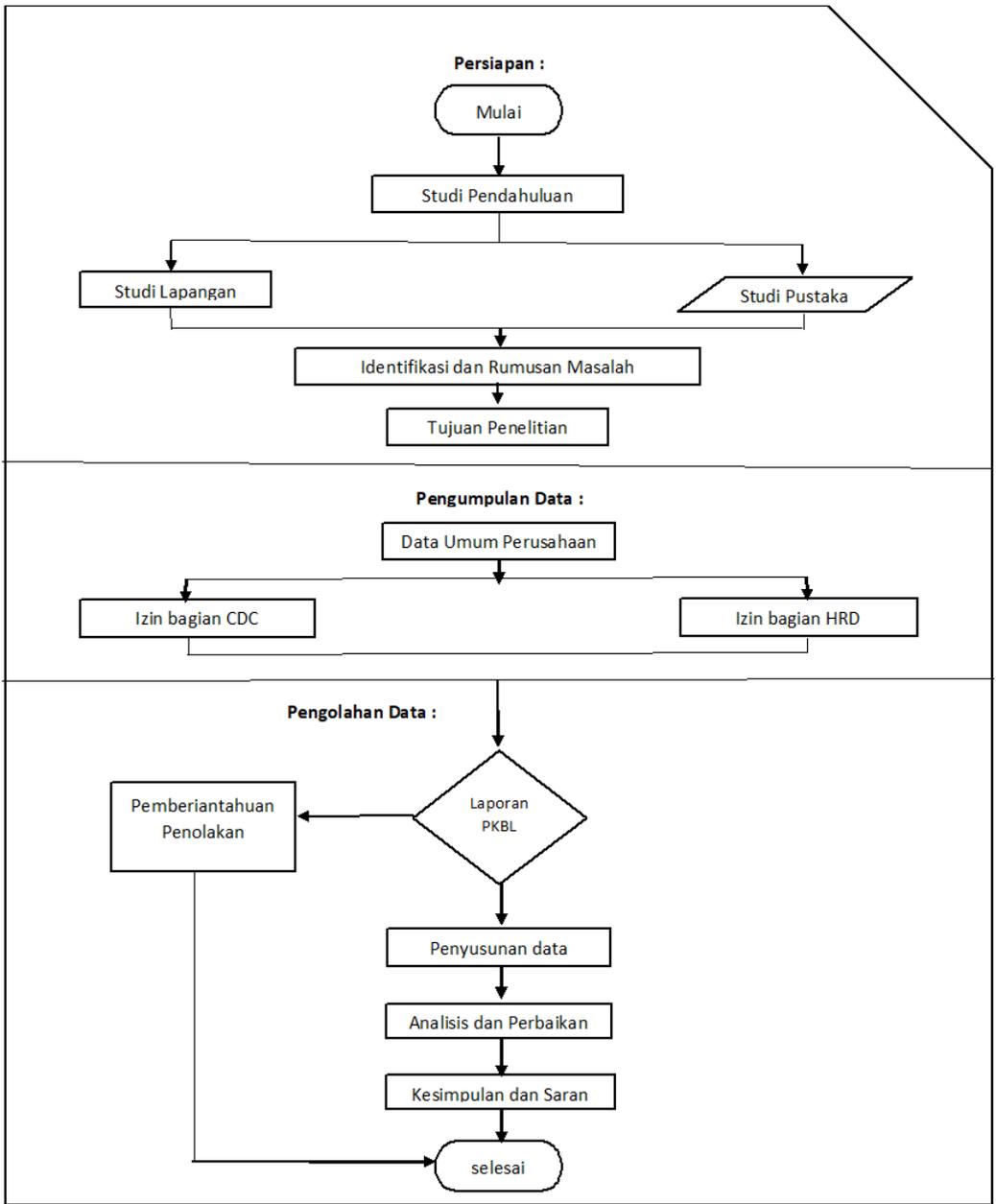
2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Output yang ada dalam penelitian, meliputi pengklarifikasian sistem yang berlaku pada bagian *Community Development Center (CDC)* berdasarkan pengalaman magang peneliti pada masa lalu.

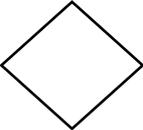
3.1.1 Model Konseptual Penelitian

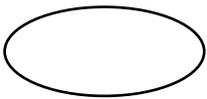
Gambar 1



Berikut tabel yang menunjukkan keterangan simbol-simbol pada gambar 1

Tabel 1

Gambar	Simbol untuk	Keterangan
	Proses / Langkah	Menyatakan kegiatan yang akan ditampilkan dalam diagram alir
	Titik Keputusan	Proses / langkah dimana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu.
		

	Masukan / keluaran data	Digunakan untuk mewakili data masuk, atau data keluar
	Terminasi	Digunakan untuk mewakili data masuk, atau data keluar.
	Garis alir	Menunjukkan arah aliran proses atau algoritma.